



DPD Kecewa dengan Daerah

Susah Ajak Konsolidasi, Pembangunan Macet

DENPASAR - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Bali dan Wagub kecewa dengan sikap kabupaten/kota terkait pembangunan di Pulau Dewata. Hal itu terlihat dari minimnya partisipasi pemerintah daerah kabupaten/kota datang saat rembuk bersama atau musyawarah rencana pembangunan (musrembang) di Bali, kemarin (23/9) ■

► Baca *DPD...* Hal 31

Kacaunya Sinkronisasi Provinsi dan Daerah

- Setiap kali diundang rapat dalam hal merencanakan pembangunan di Bali yang akan diteruskan ke kabupaten/kota, pemangku kepentingan jarang hadir.
- Masalah sinkronisasi kebijakan ini selalu berbenturan dengan program pembangunan pusat. Sehingga kebijakan pusat tidak sampai ke daerah.
- Tidak hanya pemerintah Provinsi Bali saja yang harus berjuang juga pemerintah kabupaten/kota, sebab pemerintah kabupaten kota ini mempunyai kewajiban juga menyampaikan program pembangunan dari pusat untuk masyarakat.
- Persoalan sinkronisasi ini juga mengakibatkan pembangunan di daerah mandek.

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Edisi : Jumat, 25 September 2015

Hal : 21



Rumah Sakit

Soroti Soal IMB



ADRIAN SUWANTORADAR BALI

AKRAB: Anggota DPD RI Cok Ratmadi (kiri) dan Wagub Ketut Sudikerta (udeng putih) saat rapat koordinasi sinkronisasi aspirasi daerah di Sanur, kemarin.

■ DPD

Sambungan dari hal 21

Sorotan disampaikan ketika menghadiri rapat koordinasi sinkronisasi aspirasi daerah dalam rangka konsolidasi anggota DPD RI Provinsi Bali dengan pemangku kepentingan di daerah pemilihan untuk percepatan pembangunan daerah di Hotel Paradise, Sanur.

Sudikerta mempertanyakan komitmen bersama pemerintah kabupaten/kota, sebab selama ini, setiap kali diundang rapat dalam hal merencanakan pembangunan di Bali yang akan diteruskan ke kabupaten/kota, pemangku kepentingan jarang hadir.

"Sering kali memang seperti itu, kadang yang datang adalah perwakilan yang tidak mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan. Jadi, bagaimana mau sinkron kebijakan dari pusat ke daerah provinsi, maupun ke kabupaten/kota," terangnya.

Sudikerta menyambut baik maksud dari DPD RI dalam hal sinkronisasi antar pusat dan daerah ini, apalagi jika pembangunan di Bali terus diperjuangkan di pemerintah pusat, sehingga bisa

terwujud yang akan digunakan untuk melayani masyarakat. "Kami di Provinsi Bali menyambut baik atensi dari anggota DPD RI ini. Saya rasa ini juga merupakan kewajiban beliau untuk memperjuangkan," ujarnya.

Menurut Sudikerta, acara-acara seperti ini seharusnya diikuti oleh pihak pemangku kebijakan di daerah sehingga ketika ada sebuah rencana pembangunan dari pusat ke daerah ada kesinambungan dan tidak terjadi lagi kontradiktif. "Ayo kita sama-sama menyatukan persepsi, menyatukan draf langkah untuk mengam-

bil kebijakan. Tentu orientasinya kebijakan itu menyangkut kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat Bali, itu lah yang perlu dipahami oleh pemimpin di kabupaten/kota ini. Jadi, jelas alur kebijakannya," tegasnya.

Sementara itu, salah seorang senator asal Bali Gede Pasek Suardika mengatakan selama ini memang di semua daerah termasuk juga di Bali mengenai masalah sinkronisasi kebijakan berbenturan dengan program pembangunan pusat. "Sehingga kebijakan pusat tidak sampai ke daerah," terangnya.

Menurut Pasek, tidak hanya pemerintah Provinsi Bali saja yang harus berjuang, juga pemerintah kabupaten/kota, sebab pemerintah kabupaten/kota ini mempunyai kewajiban juga menyampaikan program pembangunan dari pusat untuk masyarakat. "Jadi, mari kita bersama membangun Bali ini. Banyak program pusat, tetapi justru dananya tidak bisa dialirkan ke daerah karena tidak ada sinkronisasi," ujarnya.

Sementara itu, Arya Wedakarna dalam sambutannya juga menyorot soal Kota Denpasar mengenai masalah pengembangan

RS Indra dan RS Internasional Bali Mandara yang tidak dikeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) khususnya RS Indra untuk pengembangan. "Ini kan untuk kepentingan masyarakat,

dananya sudah ada, kok susah mengeluarkan izin," terangnya.

Persoalan ini lah yang memicu mandeknya pembangunan di daerah yang khususnya langsung bisa menyentuh mas-

asyarakat. "Ini meski dievaluasi bersama. DPD RI mempunyai tugas dan wewenang untuk mendesak daerah dalam hal pembangunan di daerah," pungkask Arya Wedakarna. (hen/yes)

Edisi : Jumat, 25 September 2015

Hal : 31



Radar Bali

DPD Kecewa dengan Daerah

Susah Ajak Konsolidasi, Pembangunan Macet

DENPASAR - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Bali dan Wagub kecewa dengan sikap kabupaten/kota terkait pembangunan di Pulau Dewata. Hal itu terlihat dari minimnya partisipasi pemerintah daerah kabupaten/kota datang saat rembuk bersama atau musyawarah rencana pembangunan (musrembang) di Bali, kemarin (23/9) ■

► Baca *DPD...* Hal 31

Kacaunya Sinkronisasi Provinsi dan Daerah

- Setiap kali diundang rapat dalam hal merencanakan pembangunan di Bali yang akan diteruskan ke kabupaten/kota, pemangku kepentingan jarang hadir.
- Masalah sinkronisasi kebijakan ini selalu berbenturan dengan program pembangunan pusat. Sehingga kebijakan pusat tidak sampai ke daerah.
- Tidak hanya pemerintah Provinsi Bali saja yang harus berjuang juga pemerintah kabupaten/kota, sebab pemerintah kabupaten kota ini mempunyai kewajiban juga menyampaikan program pembangunan dari pusat untuk masyarakat.
- Persoalan sinkronisasi ini juga mengakibatkan pembangunan di daerah mandek.

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Edisi : Jumat, 25 September 2015

Hal : 21



Rumah Sakit

Soroti Soal IMB



ADRIAN SUWANTORADAR BALI

AKRAB: Anggota DPD RI Cok Ratmadi (kiri) dan Wagub Ketut Sudikerta (udeng putih) saat rapat koordinasi sinkronisasi aspirasi daerah di Sanur, kemarin.

■ DPD

Sambungan dari hal 21

Sorotan disampaikan ketika menghadiri rapat koordinasi sinkronisasi aspirasi daerah dalam rangka konsolidasi anggota DPD RI Provinsi Bali dengan pemangku kepentingan di daerah pemilihan untuk percepatan pembangunan daerah di Hotel Paradise, Sanur.

Sudikerta mempertanyakan komitmen bersama pemerintah kabupaten/kota, sebab selama ini, setiap kali diundang rapat dalam hal merencanakan pembangunan di Bali yang akan diteruskan ke kabupaten/kota, pemangku kepentingan jarang hadir.

"Sering kali memang seperti itu, kadang yang datang adalah perwakilan yang tidak mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan. Jadi, bagaimana mau sinkron kebijakan dari pusat ke daerah provinsi, maupun ke kabupaten/kota," terangnya.

Sudikerta menyambut baik maksud dari DPD RI dalam hal sinkronisasi antar pusat dan daerah ini, apalagi jika pembangunan di Bali terus diperjuangkan di pemerintah pusat, sehingga bisa

terwujud yang akan digunakan untuk melayani masyarakat. "Kami di Provinsi Bali menyambut baik atensi dari anggota DPD RI ini. Saya rasa ini juga merupakan kewajiban beliau untuk memperjuangkan," ujarnya.

Menurut Sudikerta, acara-acara seperti ini seharusnya diikuti oleh pihak pemangku kebijakan di daerah sehingga ketika ada sebuah rencana pembangunan dari pusat ke daerah ada kesinambungan dan tidak terjadi lagi kontradiktif. "Ayo kita sama-sama menyatukan persepsi, menyatukan draf langkah untuk mengam-

bil kebijakan. Tentu orientasinya kebijakan itu menyangkut kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat Bali, itu lah yang perlu dipahami oleh pemimpin di kabupaten/kota ini. Jadi, jelas alur kebijakannya," tegasnya.

Sementara itu, salah seorang senator asal Bali Gede Pasek Suardika mengatakan selama ini memang di semua daerah termasuk juga di Bali mengenai masalah sinkronisasi kebijakan berbenturan dengan program pembangunan pusat. "Sehingga kebijakan pusat tidak sampai ke daerah," terangnya.

Menurut Pasek, tidak hanya pemerintah Provinsi Bali saja yang harus berjuang, juga pemerintah kabupaten/kota, sebab pemerintah kabupaten/kota ini mempunyai kewajiban juga menyampaikan program pembangunan dari pusat untuk masyarakat. "Jadi, mari kita bersama membangun Bali ini. Banyak program pusat, tetapi justru dananya tidak bisa dialirkan ke daerah karena tidak ada sinkronisasi," ujarnya.

Sementara itu, Arya Wedakarna dalam sambutannya juga menyorot soal Kota Denpasar mengenai masalah pengembangan

RS Indra dan RS Internasional Bali Mandara yang tidak dikeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) khususnya RS Indra untuk pengembangan. "Ini kan untuk kepentingan masyarakat,

dananya sudah ada, kok susah mengeluarkan izin," terangnya.

Persoalan ini lah yang memicu mandeknya pembangunan di daerah yang khususnya langsung bisa menyentuh mas-

asyarakat. "Ini meski dievaluasi bersama. DPD RI mempunyai tugas dan wewenang untuk mendesak daerah dalam hal pembangunan di daerah," pungkask Arya Wedakarna. (hen/yes)

Edisi : Jumat, 25 September 2015

Hal : 31